

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sudah lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dasar Hukum E-LAKIP

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja.
- KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Inpres no.7 tahun 1999.

Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dikeluarkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang logis, jelas dan akurat. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dimasa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LAKIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 - 2019

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Mengingat tantangan yang dihadapi kedepan akan semakin berat dan kompleks, diperlukan interkoneksi peran dan fungsi ketiga unsur/domain tersebut dalam konsepsi manajemen strategik dan implementasinya berdasarkan

prinsip-prinsip; akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), aturan hukum (*rule of law*), keadilan (*fairness*) dan partisipasi (*participation*). Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus segera direspon secara proaktif melalui penerapan manajemen perubahan yang visioner dan pembelajaran kolektif terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat, untuk itu diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab serta bebas KKN.

Semangat untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Di dalam Undang-Undang tersebut terikat pada 7 (tujuh) asas yang menjadi landasan serta orientasi bagi para penyelenggara pemerintahan, yakni ***asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, orientasi pada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas serta akuntabilitas.***

Analisis capaian kinerja / permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 - 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 dibuat sebagai pertanggung jawaban kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 115 adalah sebagai berikut : “Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan di bidang Perindustrian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas Pembantuan”.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 115, Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian meliputi bidang industri tekstil, elektronika dan telematika, dan aneka, bidang industri logam, mesin, dan transportasi. Bidang industri agro, kimia, dan hasil hutan, bidang industri kecil dan menengah.
2. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang perindustrian meliputi bidang industri tekstil, elektronika dan telematika, dan aneka, bidang industri logam, mesin, dan transportasi, bidang industri agro, kimia dan hasil hutan, bidang industri kecil dan menengah.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang perindustrian meliputi bidang industri tekstil, elektronika dan telematika, dan aneka, bidang industri logam, mesin, dan transportasi, bidang industri agro, kimia dan hasil hutan, bidang industri kecil dan menengah.
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dinamika lingkungan strategis yang berlangsung sangat cepat merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Faktor perubahan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi dinamika pembangunan, sehingga diperlukan respon proaktif dan antisipatif untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian di berbagai sektor pembangunan terutama dengan telah diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Lingkungan strategis yang berpengaruh bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan strategis internal yang berpengaruh terhadap pencapaian misi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan mencakup empat unsur utama, yaitu : (a) sumberdaya aparatur, (b) sarana dan prasarana, (c) keuangan, dan (d) kelembagaan. Adapun lingkungan strategis eksternal yang mempengaruhi pembangunan Sektor Industri Sulawesi Selatan sbb:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan strategis internal yang berpengaruh terhadap pencapaian misi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan mencakup empat unsur utama, yaitu: (a) sumberdaya aparatur, (b) prasarana dan sarana, (c) keuangan, dan (d) kelembagaan.

a. Sumberdaya Aparatur

Sumber daya Aparatur yang dimiliki Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan secara kuantitatif sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebanyak 78 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- Pegawai negeri sipil fungsional umum sejumlah 67 orang atau (87,18%) dan fungsional tertentu sejumlah 11 orang (12,82%).

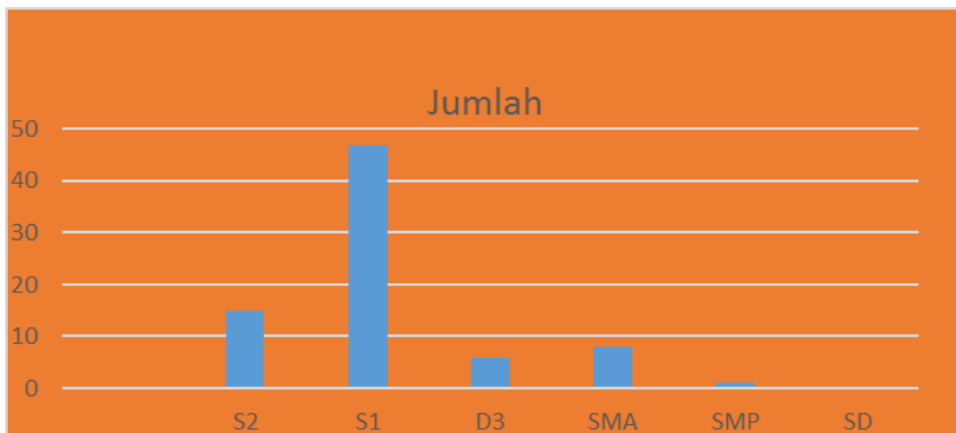
Jumlah pegawai	jumlah
Fungsional Umum	67
Fungsional Tertentu	11



- Bila dilihat dari segi kualitas khususnya tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dirinci sebagai berikut :
 - berkualifikasi Pasca Sarjana (S2) 15orang (19,18%),
 - Laki-laki :5 orang
 - Perempuan : 10 orang
 - berkualifikasi Sarjana (S1) 47 orang (60,27 %),
 - Laki-laki : 22 orang
 - Perempuan : 25 orang

- berkualifikasi D3 sebanyak 6 orang (8,22 %),
 Laki-laki : 4 orang
 Perempuan : 2 orang
- berkualifikasi SLTA 8 orang (10,96 %),
 Laki-laki : 6 orang
 Perempuan : 4 orang
- berkualitas SLTP 1 orang (1,37%)
 Laki-laki : 1 orang
 Perempuan : 0 orang

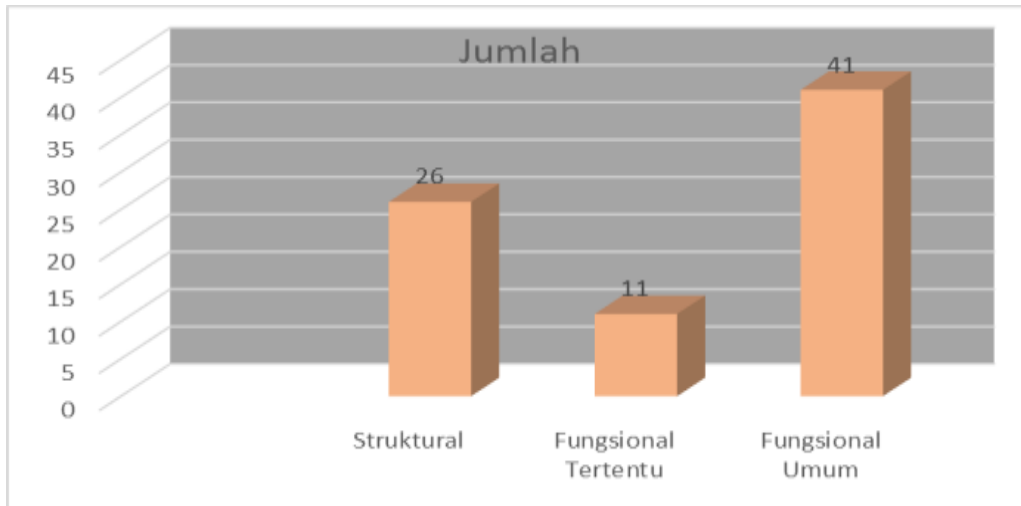
Tingkat pendidikan	Jumlah
S2	15
S1	47
D3	6
SMA	8
SMP	1
SD	0



Tingkat Pendidikan PNS Disperindustrian Prov.Sulsel

Dari sisi pangkat dan golongan keadaan pegawai Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan akhir Desember 2019 sebagai berikut :

Pangkat/Gol	Jumlah
Struktural	26
Fungsional Tertentu	11
Fungsional Umum	41



Ditinjau dari jumlah PNS yang ada pada Dinas Perindustrian dan Provinsi Sulawesi Selatan sudah memadai, namun bila dilihat dari tingkat kompetensinya perlu peningkatan SDM yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil di dalam menjabat suatu jabatan struktural maupun jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya serta khususnya dalam menunjang visi dan misi organisasi. Mengenai pegawai negeri sipil yang mengisi jabatan fungsional tertentu sebanyak 11 orang perlu mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan kompetensinya dan perlu dipertegas implementasi penugasannya agar lebih optimal dan tidak tumpang tindih. Selain faktor jumlah dan kualifikasi pendidikan, faktor lain yang sangat perlu mendapat perhatian adalah motivasi dan kedisiplinan.

a. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan. Demikian juga Sarana dan fasilitas unit pelayanan teknis logam; dan tekstil, serta sarana mobilitas juga masih memerlukan peningkatan baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sampai akhir Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran, sedangkan aset berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagai berikut :

Tabel: Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan

NO	JENIS/NAMA GEDUNG	LUAS, M2		Lokasi/ Alamat
		Tanah	Bangunan	
1	Bangunan Rumah Dinas	607	270	Jl. Kumala No.166 makassar
2	Bangunan kantor UPT IMMK	725	120	Jl. S. Alauddin No.134 Lr.Salemba
3	Bangunan Rumah Dinas	900	265	Jl. Adyaksa
4	Bangunan Kantor UPTD Logam		433	Jl.Ir.Sutami Blok 1-2 Mks
5	- Pagar Gedung UPTD Logam			
6	- Pemasangan Instalasi			
7	Bangunan Kantor UPT Tekstil	512	453	Kel. Kalosi Enrekang
8	Bangunan Kantor UPT Logam	7.375	10.000	Jl. Industri Kecil Pare-Pare
9	Bangunan Workshop UPT Logam		10.000	Jl. Industri Kecil Pare-Pare
10	Bangunan Kantor UPT Tekstil	4.062	453	Jl. Malingkaan Impalmpa Kab. Wajo
11	Bangunan Kantor	8.935	267	Ds. Solie Kec. Donro Donri Kab. Soppeng
12	Bangunan Kantor UPTD Tekstil		-	Ds. Solie Kec. Donro Donri Kab. Soppeng
13	Bangunan Showroom		10.000	Jl. Industri kecil Pare-pare
14	Pagar Gedung UPTD Logam Pare		800	Jl. Industri kecil Pare-pare
15	Gedung Pengelasan UPTD Logam	11.301	496	Jl. Massepe (Amparita) Kab. Sidrap
16	Bangunan Gedung Pengolahan			Jl.Kima VIII Mks
17	Bangunan Gedung Workshop	5.050		Ir. Sutami (Tol)
18	Pagar Rumah Dinas			Jl. Kumala No. 166 Mks
19	Pengadaan Vertical Blind			Jl. Manunggal 22
20	Ruang Sekretaris			Jl. Manunggal 22
21	Pagar UPT Soppeng			Ds. Solie Kec. Donri-donri Soppeng
22	Pintu Gerbang Sentra			Jl.Sultan Hasanuddin Cakke, Maroangin Desa Botto Malangga Kec. Maiwa Kab. Enrekang

23	Pergantian Atap Rumah Dinas			Jl. Kumala No. 166 Makassar
24	Bangunan Rumah Dinas (Dekranasda)			Jl. Jenderal Sudirman
25	Sekat Ruang Kepala Dians			Jl. Manunggal 22 kec. Maccini Sombala
26	Pagar UPT Logam Sidrap			Jl. Angkasa 45, Massepe Kab. Sidrap
27	Pagar UPT Tekstil Enrekang			Jl. Pasangggrahan Kalosi Enrekang
28	Pintu Gerbang Sentra			Desa Bungaya Kec. Bonto Mate'ne Kab. Kepulauan Selayar
29	Pintu Gerbang Sentra			Jl. Poros Rantepao-Buntao' Lembang La'bo. Kec. Sanggalangi' Kab. Toraut

b. Sumberdaya Keuangan

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perangkat otonomi daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN (dekonsentrasi).

Jumlah APBD Sektor INDUSTRI Tahun 2019 (per Desember 2019)

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2019	Rp. 19.778.053.268.	Rp. 19.523.547.565.	98.71%

Jumlah dana APBD yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2019 APBD Disperindustrian Prov. Sul-Sel Tahun 2019 sebesar Rp. 19.778.053.268,- Belanja Langsung yang terdiri dari 7 (Tujuh) program dan 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan sebesar **Rp. 10.637.028.350,-** dengan realisasi Rp. 10.382.522.647,- (97,61 %).

Anggaran	Jumlah
Belanja Anggaran APBD	19.778.053.268
Belanja Langsung	10.637.028.350
Realisasi	10.382.522.647



Selain penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD, dalam Tahun Anggaran 2019 Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan tugas dekonsentrasi (APBN) di Sektor Industri dengan jumlah dana **Rp 2,987,460.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **2.,800,416,292.** (93,74%).

c. Kelembagaan

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas (eselon II A), dengan membawahi 6 (enam) eselon III yakni 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, 4 (empat) orang Kepala Bidang dan 1 (satu) orang Kepala UPTD.

Adapun struktur organisasi sebagai sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam penilaian akuntabilitas tersebut diperlukan pengukuran kinerja, yaitu suatu instrumen manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menjadi jembatan antara perencanaan strategis dan akuntabilitas.

A. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja Program Utama yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Ikhtisar pengukuran kinerja kegiatan dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Rencana Strategis 2018 - 2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang juga tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan, meliputi:

- a. Masukan (*inputs*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. Keluaran (*outputs*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.
- c. Hasil (*outcomes*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Manfaat (*benefits*), adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

- e. Dampak (*impacts*). adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator tersebut telah dilakukan pada Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengetahui persentase tingkat capaian tiap-tiap indikator kegiatan, dengan membandingkan realisasi terhadap rencana (target) yang ditetapkan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan salah satu dari rumus berikut, tergantung karakteristik indikatornya, yaitu:

Rumus 1:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Rumus 2:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Rumus Pertama digunakan untuk mengukur terhadap pencapaian fungsi tujuan maksimisasi, sedangkan Rumus Kedua digunakan untuk mengukur pencapaian fungsi minimisasi. Rumus tersebut digunakan untuk mengukur semua kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019. Dan dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh hasil pengukuran rata-rata terhadap 36 kegiatan APBD Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tingkat Pencapaian rata-rata Indikator <i>input</i> kegiatan	: 95,81%
Tingkat Pencapaian rata-rata Indikator <i>output</i> kegiatan	: 95,81 %
Tingkat Pencapaian rata-rata Indikator <i>outcome</i> kegiatan	: 95,81 %

Hasil pengukuran tingkat pencapaian rata-rata menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan memperlihatkan efektivitas anggaran karena capaiannya baik terhadap penyerapan anggaran.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam rencana kinerja disusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023 di mana setiap tahunnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan unit pelaksana.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN

Rencana strategis sektor Industri dan Perdagangan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan tetap memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. RPJMD tersebut menjadi dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2018 - 2023.

Visi Dan Misi

Visi Dan Misi 2019-2023

1. Visi

Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan RPJPD 2008-2028 Sulawesi Selatan, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan, serta visi misi Gubernur/Wakil Gubernur. Untuk itu Visi Pembangunan Sulawesi Selatan untuk 5 tahun pertama RPJMD 2018-2023 adalah:

“Sulawesi selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter”.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi didalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana

terjemahkan provinsi sulawesi selatan yang “bersih dan melayani” terkoneksi”, mandiri dan sejahtera”, sehat dan cerdas serta berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. **INOVATIF** adalah kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk Baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud sulawesi selatan yang bersih melayani.
2. **KOMPETITIF** adalah kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud sulawesi selatan yang sehat dan cerdas.
3. **PRODUKTIF** adalah kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujudnya sulawesi selatan yang mandiri dan sejahtera.
4. **INKLUSIF** Adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi .
5. **BERKARAKTER** Adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan sulawesi selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud sulawesi selatan yang berkarakter.

2. Misi

Adapun misi pembangunan Daerah ada 7 (tujuh), yaitu:

- 1) Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- 2) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
- 4) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
- 5) Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
- 6) Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa
- 7) Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak diajalkan dinyatakan dalam rumusan sebagai berikut :

1. **Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi mealayani dan inovatif**, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi
2. **Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel**, membangun infrastruktur dalam menguatkan interkoneksi antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir.
3. **Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif**. Menegembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komperatif wilayah.
4. **Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif**, inklusif dan berkarakter. memenuhi akses pendidikan yang berkualitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa hambatan bagi seluruh warga serta mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah.
5. **Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan**, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam .

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, maka visi Dinas Perindustrian tahun 2018 – 2023 yang hendak dicapai dalam tahapan pertama Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

“Sektor Industri Sebagai Pilar Perekonomian Terdepan Sulawesi Selatan”

Adapun misi Dinas Perindustrian tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| Pertama | : | Mengembangkan industri bernilai tambah dan berdaya saing tinggi |
| Kedua | : | Meningkatkan nilai tambah produk industri |
| Ketiga | : | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industri |
| Keempat | : | Meningkatkan jumlah industri kecil, menengah dan besar serta optimalisasi utilisasi industri. |
| Kelima | : | Memperkuat struktur industri melalui keterkaitan antara industri besar dan industri kecil menengah pembentukan dan pengembangan kawasan industri |

Untuk mewujudkan ke 5 (lima) misi tersebut, nilai-nilai agama dan budaya daerah dijadikan dasar pelaksanaannya dengan senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

- (a) *Good Governance* (tata kelola pemerintahan), yaitu pengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat;
- (b) *Integrity* (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
- (c) *Quality and Accountability* (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
- (d) *Pemerataan pembangunan yang berkeadilan*, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarannya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.
- (e) Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan tersebut maka arah dan pokok-pokok kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Perindustrian Sulawesi Selatan
2. Pengembangan Teknologi Industri berbasis kompetensi daerah dalam meningkatkan daya saing.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

- b. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
- c. Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong perekonomian daerah
- d. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru
- e. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru
- f. Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
- b. Peningkatan jumlah industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/ kota;
- c. Peningkatan jumlah Sentra industri dan kawasan industri.
- d. Peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor industri
- e. Peningkatan kemampuan teknologi dan proses inovasi pada industri (innovation core)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2019
1	Meningkatnya akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas	Persentase Nilai SAKIP	100 % 100 %

	perangkat daerah	kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Organisasi Perangkat Daerah % ASN Nilai SKP kategori baik Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	100 %
2	Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong perekonomian daerah	Peningkatan jumlah industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/ kota	Jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah	1000 IKM
3	Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru	Peningkatan jumlah Sentra industri dan kawasan industr	jumlah sentra industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan Jumlah Kawasan industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan	3 sentra 1 kawasan
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja di sektor industri	Peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor	jumlah SDM industri yang dibina	100 orang

		industry		
5	Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industry	Peningkatan kemampuan teknologi dan proses inovasi pada industri (innovation core)	Jumlah inovasi industri yang dikembangkan untuk hilirisasi industri	6 Inovasi

3. Strategi, Kebijakan Dan Program

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi diperlukan perumusan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun strategi dasar yang ditempuh adalah :

"Meningkatkan fasilitasi dan pelayanan yang efisien, efektif dan akuntabel di sektor industri guna mewujudkan sektor industri sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan kompetensi inti daerah".

Untuk mewujudkan tersebut maka pokok-pokok kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Perindustrian Propinsi Sulawesi Selatan
- Peningkatan teknologi dan daya saing produk.
- Penataan struktur industri

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2019 telah merumuskan 8 (delapan) program yang merupakan penjabaran dari strategi dasar dan 5 (lima) kebijakan publik di atas. Ke-8 (delapan) program tersebut adalah :

- (1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
- (2) Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- (3) Program pengembangan industri kecil dan menengah
- (4) Program pelayanan administrasi perkantoran
- (5) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- (6) Program Peningkatan perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja
- (7) Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
- (8) Program pengembangan sentra sentra industri

Keterkaitan antara program Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dengan RP JMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

Tabel 2.1. Keterkaitan RP JMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Program Dinas Perindustrian

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik
		Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan
		Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS
		Penyediaan Alat Tulis Kantor,	Jumlah ATK yang tersedia

		Barang Cetak dan Penggandaan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia
		Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara
		Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara
		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
		Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan

			ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan
		Kegiatan penyusunan dan pengelolaan administrasi leuangan	Jumlah usulan kegiatan dana APBD dan dekonsentrasi, tugas pembantuan dana DAK
		Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semester dan akhir tahun	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi semester dan akhir tahun
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun
		Pengadaan Pakaian Dinas lapangan dan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian tertentu Beserta Perlengkapannya yang tersedia
Peningkatan jumlah Sentra industri dan kawasan industri	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI	Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Rumput Laut	jumlah sentra industri rumput laut yang dibentuk dan dibina

	(Prioritas)		
		Pengembangan dan pembinaan sentra industri kakao	jumlah sentra industri kakao yang dibentuk dan dibina
		Pengembangan dan pembinaan sentra industri kopi	jumlah sentra industri kopi yang dibentuk dan dibina
		Pengembangan dan pembinaan sentra industri hasil hutan	jumlah sentra industri hasil hutan yang dibentuk dan dibina
		Pengembangan dan pembinaan sentra industri tekstil dan sutera	jumlah sentra industri tekstil dan sutera yang dibentuk dan dibina
		Pengembangan dan pembinaan sentra industri pande besi	jumlah sentra industri pande besi yang dibentuk dan dibina
		Pengembangan dan pembinaan sentra industri kapal rakyat	jumlah sentra industri kapal rakyat yang dibentuk dan dibina
		pengembangan dan pembinaan sentra industri jagung	Jumlah sentra IKM jagung yang dibina dan dikembangkan
Peningkatan kapasitas teknologi, SDM dan sistem	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM	Pembuatan prototype alat/ mesin pertanian	Jumlah prototype alat/ mesin pertanian yang dibuat

produksi	PRODUKSI		
		Sosialisasi/ demonstrasi alat/ mesin pertanian di kabupaten/ kota	jumlah ikm yang mengikuti sosialisasi
		sinergitas industri alat transportasi, logam dan mesin ke pusat (kementrian perindustrian)	jumlah sinergitas industri alat transportasi, logam dan mesin ke pusat yang dilaksanakan
		Penatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) makanan, minuman dan kemasan	jumlah pelayanan yang dilaksanakan pada UPT Mamin dan kemasan
		Pengembangan Industri Makanan Minuman dan Kemasan Bermitra dengan pelaku usaha industri	jumlah pelaku usaha industri yang bermitra dengan UPT mamin dan kemasan
		Pelayanan dan Pengembangan Teknologi Makanan Minuman dan Kemasan	jumlah IKM yang dikembangkan dan dilayani di UPT mamin dan kemasan
		Pengembangan industri kreatif berbasis komunitas	jumlah industri start up yang dibina dan akses inkubator bisnis oleh tenant
		Pengembangan technopark berbasis IT	jumlah wirausaha IT baru yang dilatih

		Pembinaan standarisasi produk industri	Jumlah IKM yang terstandarisasi
		Pengembangan SDM dan Produk Industri Fashion dan Garmen	Jumlah SDM dan Produk IKM fashion dan garmen yang dikembangkan
		Pengembangan SDM dan produk industri Elektronika dan Telematika melalui sistem vokasional (magang	jumlah IKM elektronika dan telematika yang dimagangkan
Peningkatan jumlah industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/kota serta hilirisasi sektor perindustrian	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	IKM Expo	Jumlah peserta IKM yang mengikuti IKM expo
		Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir	jumlah IKM kimia hilir yang dibina dan dikembangkan
		Pembinaan dan pengembangan industri Hasil Hutan Kayu	jumlah IKM hasil hutan kayu yang dibina dan dikembangkan
		Pembinaan dan pengembangan industri hasil hutan bukan kayu	jumlah IKM hasil hutan bukan kayu yang dibina dan dikembangkan
		Pameran produk ikm pada event	jumlah IKM yang produknya

		daerah, Nasional dan Internasional	terpromosikan pada event IKM Ekspo
		Pembinaan dan Pengembangan industri kecil dan menengah	jumlah IKM yang dibina dan dikembangkan
		Pelatihan penerapan GMP kimia hilir	Jumlah IKM yang mengikuti pelatoha
		Pembinaan dan Pengembangan Hilirisasi Hasil Pertanian	jumlah IKM hasil pertanian yang dibina dan dikembangkan
		Pembinaan dan pengembangan hilirisasi hasil peternakan	Jumlah IKM hasil peternakan yang dibina dan dikembangkan
		Pembinaan dan pengembangan industri hilirisasi hasil kehutanan	umlah IKM hilirisasi hasil kehutanan yang dibina
Peningkatan kemampuan teknologi dan inovasi industri	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Pembinaan kemampuan teknologi industri alat angkut	jumlah IKM alat angkut yang dibina
		Klinik Teknologi	Jumlah IKM yang mengakses klinik teknologi
		Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Informatika	jumlah IKM elektronika dan informatika yang dibina
		Pelatihan peningkatan mutu	jumlah ikm kerajinan yang

		dan diversifikasi produk kerajinan bagi IKM	dilatih
		Pelayanan administrasi perkantoran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) logam, alsintan dan tekstil	jumlah UPTD Logam, tekstil dan alsintan yang dilayani administrasi perkantoranny
		Pelayanan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) logam dan alsintan	Jumlah IKM yang dilayani di UPTD LOgam
		Pelayanan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tekstil	jumlah IKM yang dilayani di UPTD Tekstil

B. RENCANA KINERJA (PENETAPAN INDIKATOR KINERJA)

1. Rencana Kinerja Tahun 2019

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja SKPD.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2019 disusun Rencana Kinerja (*performance plan*) setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2019 yang merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Untuk Tahun 2019 Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan melakukan serangkaian kegiatan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN (Dana

Dekonsentrasi) dari Departemen Perindustrian. Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan pada **7 (tujuh) program yang terinci dalam 55 kegiatan**, dengan rincian sesuai tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN APBD DINAS PERINDUSTRIAN TA. 2019

NO	PRORAM DAN KEGIATAN
A	BELANJA LANGSUNG
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1	Kegiatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD
3	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4	Kegiatan Penataan SDM Aparatur
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA
5	Kegiatan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
6	Kegiatan Forum SKPD
7	Kegiatan penyusunan pelaporan KEU semester dan akhirtahun
8	Kegiatan penyusunan dan pengolahan Administrasi Keuangan
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI PRIORITAS
9	Kegiatan Pengembangan Sentra Tekstil dan Sutera
10	Kegiatan Pengembangan Sentra Pande Besi
11	Kegiatan Pengembangan Sentra Rumput Laut
12	Kegiatan Pembentukan Sentra Industri Meubel
13	Kegiatan Pengembangan Sentra Kakao
14	Kegiatan Pengembangan Sentra Kerajinan Emas dan Perak
V	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
17	Kegiatan IKM Ekspo
18	Kegiatan pembinaan dan pengembangan industri kimia Hilir
19	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan industri hasil hutan
20	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan industri hasil hutan bukan kayu

21	Kegiatan pameran IKM pada event daerah nasional/internasional
22	Kegiatan pembinaan dan pengembangan hilirisasi pertanian
23	Kegiatan pembinaan dan pengembangan hilirisasi peternakan
24	Pembinaan dan pengembangan inustri kecil dan menengah
25	Pelatihan penerapan GMP kimia hilir
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
26	Kegiatan pembuatan prototype alat/mesin pertanian
27	Kegiatan sosialisasi/demontrasi alat transportasi logam dan mesin ke Kementrian Perindustrian
28	Kegiatan penatausahaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) makan, minum ,kemasan.
29	Kegiatan pengembangan industri makanan,minuman dan kemasan,bermitra dengan pelaku usaha industri.
30	Kegiatan pelayanan dan pengembangan teknologi makanan, minuman dan kemasan, Kegiatan pengembangan industri kreatif berbasis komonitas Kegiatan pengembangan technopark barbasis IT Kegiatan pembinaan standarisasi produk industri Kegiatan pengembangan SDM dan produk industri fasion dan garment Kegiatan pengembangan SDM dan industri Elektronika dan telematika melalui sistem Vokasional (magang)
VII	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
31	Kegiatan pembinaan kemampuan tehnologi industri alat angkut
32	Kegiatan Klinik tehnologi
33	Kegiatan pembinaan kemampuan tehnologi industri tehnologi elektronika dan informatika
34	Kegiatan pelatihan peningkatan mutu dan diverifikasi produk kerajinan bagi IKM
35	Kegiatan pelayanan admisnstrasi perkantoran unit pelaksana teknis daerah (UPTD) logam dan alsintan
36	Kegiatan pelayanan admisnstrasi perkantoran unit pelaksana teknis

daerah (UPTD) tekstil

Ke Tujuh Program tersebut ditetapkan dalam Renstra untuk tahun anggaran 2019 yang disesuaikan dengan penetapan indikator kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019 (terlampir).

Sedangkan dana yang bersumber dari **APBN** Kementerian Perindustrian dialokasikan pada 1 (satu) Program, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan APBN Disperindustrian TA. 2019

NO	FUNGSI/SUB FUNGSI/PRGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
A	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil ,Menengah dan aneka	2.987.460.000.
1	Penyusunan dan Evaluasi peningkata kompetensi SDM industri kecil,menengah dan aneka.	
Total		2.987.460.000

2. Faktor Kunci Keberhasilan dan Asumsi

Salah satu tahapan dalam proses manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.

Penilaian pencapaian visi dan misi, maka Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*). Faktor penentu ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisa faktor lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT (*strengthening, weakness, oppurtunity, threat*), sebagai berikut :

1. Terciptanya sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai *good governance* serta terwujudnya sistem pemerintahan yang efisien, efektif, dan profesional.

2. Keterpaduan program sektor Industri dan interkoneksi antar sektor yang terkait dengan rantai bisnis mulai dari suplai, *input*, *processing*, *output* dan *customer* yang mampu menciptakan produktivitas yang tinggi serta berdaya saing global.
3. SDM pelaku bisnis mempunyai keterampilan teknis dan manajerial serta memiliki perilaku bisnis yang berorientasi kepada pelanggan dan jaringan kerja yang luas. Penyebaran informasi perdagangan dan jasa serta adanya system distribusi barang dan jasa secara efektif dan efisien agar dapat menjamin kelancaran distribusi barang secara transparan.
4. Tersedianya anggaran dan sarana yang memadai sesuai tingkat kebutuhan minimal organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, berkewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri secara tertulis setiap berakhirnya tahun anggaran.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sumber pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan adalah bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan dana APBN. Dinas Perindustrian memperoleh pendapatan daerah dari retribusi: ekstensifikasi pemakaian kekayaan unit pelayanan teknis logam dan tekstil.

Sedangkan untuk pelaksanaan teknis logam dan tekstil dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi UPT Logam dan Tekstil.

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari Restribusi Jasa Umum dan Restribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Adapun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2017 - 2019 adalah dapat dilihat dalam sebagai berikut :

Target dan Realisasi PAD TA. 2017- 2019.

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2017	255.225.000	131.000.000	51,33 % (Dinas Perindustrian)
2018	151.415.000	146.000.500	96,59%(Dinas Perindustrian)
2019	183.120.000.	145.826.500.	79,63% (Dinas Perindustrian)

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp **145.826.500,-** atau **79,63 %** dari target penerimaan sebesar **Rp 183.120.000.-**.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2019 terealisasi namun tidak mencapai nilai optimal. **Penurunan PAD** Dinas Perindustrian Tahun 2019 disebabkan karena :

- 1. UPTD Tekstil** :
 - Mesin dan peralatan sudah tua.
 - Harga bahan baku tinggi dan langka nya bahan baku benang local.
- 2. UPTD Logam** :
 - Mesin/ peralatan sudah tua, ada yang rusak dan tidak presisi lagi sehingga tidak dapat bersaing dengan competitor lain yang memiliki mesin/ peralatan yang modern dan terbaru.
 - Tidak adanya sarana berupa mobile service untuk menjangkau pelayanan kepada pelanggan.
 - SDM terbatas

2. Pengelolaan Belanja Daerah

a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Keuangan daerah diarahkan pada kebijakan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebijakan umum APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019.

b. Target dan Realisasi belanja

Pencapaian sasaran kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Rencana Strategis 2018 - 2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang juga tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019.

Sasaran Kinerja yang dicapai Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Pada tahun 2019 Dinas Perindustrian melaksanakan 8 Program dan 36 Kegiatan yang dijabarkan yaitu sebagai berikut :

Pada urusan industri terdapat 7 program, yaitu

1) Program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan prioritasnya adalah sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dimana capaian programnya adalah optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program dan daerah, kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran dimana capaian programnya terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

2) Program peningkatan sarana dan prasarana kegiatan prioritasnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dimana capaian programnya tersedianya sarana dan prasarana aparatur, kegiatan penataan SDM aparatur dimana capaian programnya adalah meningkatnya disiplin aparatur.

3) Program peningkatan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja kegiatan prioritasnya adalah perencanaan monitoring dan evaluasi capaian programnya adalah tersedianya bahan kebijakan pembangunan dan pengembangan industri, kegiatan forum SKPD capaian programnya adalah terjalinnnya koordinasi kegiatan pemerintah provinsi dan kab/kota, kegiatan peningkatan system informasi industri dan perdagangan capaian programnya adalah dimanfaatkannya informasi industri sulsel melalui situs internet, kegiatan penataan administrasi keuangan dimana capaian programnya tersedianya laporan dan dokumen SKPD, terlaksananya kegiatan bimtek/FGD pengelolaan keuangan berbasis akrual dan asset daerah.

4) Program peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur prioritasnya adalah meningkatnya disiplin aparatur serta meningkatnya kemampun SDM aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai abdi Negara,

5) Program pengembangan sentra-sentra industri kegiatan prioritasnya adalah kegiatan pengembangan sentra tekstil dan sutera, dimana capaian programnya meningkatnya kemampuan IKM pertekstilan dan persuteraan dan meningkatnya pasar produk kain tradisional, kegiatan pengembangan sentra pande besi capaian programnya terlaksananya pelatihan teknik perekayasaan alat/mesin pertanian bagi IKM alsintan, kegiatan pengembangan sentra rumput laut dimana capaian programnya meningkatnya pengetahuan dan wawasan SDM pelaku industri rumput lautdalam mengolah rumput laut menjadi produk jadi, , kegiatan pengembangan sentra kakao dimana capaian programnya adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan SDM pelaku usaha kakao, kegiatan pengembangan sentra kapal rakyat dimana capaian programnya meningkatnya kemampuan IKM sentra kapal rakyat dalam meningkatkan

kualitas dan mutu perkapaalaan,kegiatan kopi dan jagung di mana capaiannya adalah meningkatnya produksi Kopi dan jagung sebagai industri penggerak perekonomian masyarakat.

6) Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi kegiatan pelatihan teknisi prototipe capaian programnya presentase peningkatan kemampuan SDM industri pembuatan alat mesin pertanian kegiatan sinergitas alat transportasi logam dan mesin ke Kementria perindstrian dan dimana capaian programnya termanfaatkannya sosialisasi/demonstrsi alat transportasi , Kegiatan pengembangan industri makanan,minuman dan kemasan capaian programnya adalah terbentuknya kerjasama dengan pelaku usaha, pelayanan daan pengembangan tehnologi makanan,minuman,dan kemasan capaian programnya terpenuhinya sinergitas terhadap palaku usaha.kegiatan pengembangan industri berbasis Komonitas dimana capaian programnya terlatoryaindustri kratif berbasis komonitas,kegiatan tehcnopark berbasis IT capaian programnya meningkatnya kemampuan IKM dalam pemamfaatan tehcnopark ,kegiatan pembiaan standarisasi produk industri dimana capaian programnya terlaksananya pelatihan standarisasi produk, kegiatan Fasion dan garment capaian programnya terpromosinya prudik industri IKM dibidang Garment. Kegiatan magang elektronika dan telelematika ,capaian programnya meningkatnya SDM Ikm elektronikadan telematika.

7) Program pengembangan industri kecil dan menengah kegiatan prioritasnya terdapat kegiatan pengembangan industri 24 kab/kota dimana capaian programnya meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya informasi IKM di sulsel, kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya dimana capaian programnya terlaksananya peltihan SDM industri Sumber Daya Lokal, kegiatan pendukung IKM kerajinan Sulsel dimana capaian programnya meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM dan pengembangan industri kerajinan, kegiatan pembinaan pengolahan pangan, dimana capaian programnya adalah bertambahnya wirausaha baru serta tersosialisasinya hasil industri kopi secara internasional, kegiatan pembinaan dan pengembangan IKM hasil tembakau, dimana capaian programnya adalah meningkatnya wawasan masyarakat tentang cukai tembakau, kegiatan identifikasi perkembangan IKM dimana capaian programnya bertambahnya pengetahuan wirausaha baru, kegiatan karnaval silk of south sulawesi, dimana capaian programnya adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang industri kreatif, kegiatan pameran inacraft dimana capaian programnya adalah terpromosikannya produk hasil kerajinan khas Sulsel, Kegiatan diversifikasi pengolahan limbah

kulit jagung dimana capaian programnya presentase kemampuan SDM industri kerajinan & 6 juara lomba desain, pembinaan dan pelatihan industri kimia hilir, dimana capaian programnya adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku usaha garam beryodium, kegiatan

8)Program peningkatan kemampuan teknologi industri kegiatan prioritasnya adalah kegiatan pembinaan kemampuan tehnologi industri, dimana capaian programnya meningkatnya kemampuan IKM pemakaian alat transportasi , kegiatan kempuan tehnologi industri elektronika dan informatika capaian programnya terlaksananya pembinaan teknik industri elektronika dan telematika pada pelaku usaha, kegiatan peningkatan mutu dan diferifikasi produk kerajinan capaian programnya meningkatnya pengetahuan dan wawasan SDM pelaku industri dalam standarisasi produk, kegiatan Pelayanan pengadimistrasian perkantoran UPTD logam .asintan, dan tekstil dimana capaian programnya adalah terpenuhinya kegiatan perkatoran UPTD Logam asintan dan tekstil, kegiatan pelayanan dan pengembangan UTD logam,dan asintan dimana capaian programnya adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan UPTD logam dan asintan, kegiatan pelayanan dan pengembangan UPTD Tekstil dimana capaian program meningkatnya pelayanan UPTD tekstil bagi pelaku IKM kerajinan tekstiln dan meningkatnya pasar produk Tekstil.

Pencapaian Sasaran Kinerja dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini terdiri dari anggaran sebesar Rp.3.840.253.150,- dan realisasi sebesar Rp. 3.598..619.367. atau 98,95 %, dengan kegiatan sebagai berikut :**
 - a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp. 304.358.960.dan dapat di ealisasikani sebesar Rp. 291.497.138.,- atau sebesar 95,77 %. Capaian program ini adalah untuk optimalnya kinerja pelayanan jasa persuratan, komunikasi, peralatan kantor. Hasil dari program ini adalah : optimalnya koordinasi dan komonikasi pelayanan perkantoran
 - b. Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan perizinan kendaraan Ddinas Opersional dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.000.000. %,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 7.782460.,- atau 77,82 %. Capaian program ini adalah optimalnya kinerja pelayanan jasa persuratan,

komunikasi, peralatan kantor. Hasil dari program ini adalah: optimalnya operasional perkantoran berjalan dengan baik.

- c. Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan tenaga Non PNS dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.319.400.000. %,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.303.877.081,- atau 98,82 %. Capaian program ini adalah optimalnya kinerja pelayanan jasa persuratan, komunikasi, peralatan kantor. Hasil dari program ini adalah: optimalnya kinerja tenaga Non PNS dalm memberikan pelayanan perkantoran berjalan dengan baik
- d. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan, dan penggandaan di alokasikan anggaran sebesar Rp.691.575.400.dan dapat di realisasikan Rp. 684.874.200.. atau 99,03 %. Capaian program ini adalah optimalnya kinerja pelayanan jasa persuratan, komunikasi, peralatan kantor. Hasil dari program ini adalah: terpenuhinya operasional perkantoran barang cetakan dan penggandaan yang optimal
- e. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.575.000. %,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 7.320.000,- atau 96.63 %. Capaian program ini adalah optimalnya kinerja pelayanan jasa persuratan, komunikasi, peralatan kantor. Hasil dari program ini adalah: terpenuhinya instaalasi listrik/penerangan bangunan perkantoran yang baik
- f. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman di alokasikan anggaran sebesar Rp.942,084.000.dan dapat di realisasikan Rp. 941.750.000,atau 99,96. %. Capaian program ini adalah optimalnya kinerja pelayanan jasa persuratan, komunikasi, peralatan kantor. Hasil dari program ini adalah: terpenuhinya operasional perkantoran makanan dan minumam dengan baik
- g. Kegiatan pelaksanaan dan keikut sertaan pameran di alokasikan anggaran sebesar Rp.125.000.000..dan dapat di realisasikan Rp. 125.000.000.,atau 100. %. Capaian program ini adalah optimalnya kinerja pelayanan jasa persuratan, komunikasi, peralatan kantor. Hasil dari program ini adalah: terlaksananya pelaksanaan kegiatan dan keikut sertaan pameran yang optimal

- h. Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultsai dalam dan luar daerah di alokasikan anggaran sebesar Rp.236.800.000...dan dapat di realisasikan Rp. 236.518.000.,atau 99.88. %. Capaian program ini adalah optimalnya kinerja pelayanan jasa persuratan, komunikasi, peralatan kantor. Hasil dari program ini adalah: terlaksananya kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dalam mengoptimalkan pelayanan perkantoran.
- 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini terdiri dari anggaran sebesar Rp. 775.315.000,- dan realisasi sebesar Rp. 765..972.369,- atau 98,79%, dengan kegiatan sebagai berikut :**
- a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Rumah jabatan /Rumah Dinas dialokasikan anggaran sebesar Rp. 223.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 221.079..000,- atau 99,14 %. Capaian program ini adalah optimalnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Hasil dari program ini adalah: tersedianya fasilitasi pemeliharaan rutin /berkala Rumah Dinas/rumah jabatan.
- b. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung /kantor/asrama. dialokasikan anggaran sebesar Rp. 222.057.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 217.057.000,- atau 97.75. %. Capaian program ini adalah tersedianya fasilitasi pemeliharaan rutin/berkala,gedung.kantor,asrama. Hasil dari program ini adalah terpenuhinya pemeliharaan ritin /berkala, gedung asrama, sarana prasarana aparatur.
- c. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala penggantian suku cadang kendaraan Jabatan Dinas dialokasikan anggaran sebesar Rp. 196.000,000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 195.738.369,- atau 99.87. %. Capaian program ini adalah tersedianya penggantian suku cadang pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional hasil dari program ini adalah terpenuhinya pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional kantor
- d. Kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan Rumah Jabatan/ Dinas dialokasikan anggaran sebesar Rp. 52,758.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 51.958.000,- atau 98.48. %. Capaian program ini adalah tersedianya perlengkapan peralatan Rumah jabatan/Dinas hasil dari program ini adalah Terpenuhinya perlengkapan peralatan Rumah Jabatan / Dinas aparatur

- e. Kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.500.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 27.000.000,- atau 96.18. %. Capaian program ini adalah tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor hasil dari program optimalnya pemenuhan peralatan kantor dalam menunjang kinerja aparatur
- f. Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan dan peralatan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 54.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 53.140.000,- atau 98.41. %. Capaian program ini adalah terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor hasil dari program optimalnya pemeliharaan se peralatan kantor dalam menunjang kinerja aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja. Program ini terdiri dari anggaran sebesar Rp. 321.978.040,- dan realisasi sebesar Rp. 320.889.139,- atau 99.66%, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah di alokasikan anggaran sebesar Rp. 163.378.040,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 162.389.985,- atau sebesar 99.40 %. Capaian program ini adalah tersedianya bahan kebijakan, bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi. Hasil dari program ini adalah: tersedianya bahan kebijakan pembangunan Industri.
- b. Kegiatan Forum perangkat daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 33.600.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 33.600.000,- atau sebesar 99.91.%. Capaian program ini adalah tersedianya bahan kebijakan, bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi sector Indag. Hasil dari program ini adalah: adanya koordinasi kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kab/ Kota.
- c. Kegiatan penyusunan dan pengolahan administrasi keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 118.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 117.899.393,- atau sebesar 100%. Capaian program ini adalah tersedianya bahan kebijakan, bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi. Hasil dari program ini adalah: dimanfaatkannya informasi Industri sulsel melalui situs internet.
- d. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun administrasi keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 700.000,- dan

dapat direalisasi sebesar Rp. 6.999.761.,- atau sebesar 100%. Capaian program ini adalah tersedianya dokumen keuangan dan jumlah peserta bimtek . hasil dari program ini adalah : tersedianya laporan dan dokumen SKPD, terlaksananya kegiatan bimtek/FGD pengolahan keuangan berbasis akrual dan asset daerah.

4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri (prioritas). Program ini terdiri dari anggaran sebesar Rp. 1.033.133.500- dan realisasi sebesar Rp. 3.322.268.386,- atau 94,99%, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengembangan Sentra Rumput laut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 33.750.000.,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 33.750.000. atau sebesar 100%. Capaian program ini adalah terbentuknya Sentra Industri Rumput Laut di Sulsel. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya 1 sentra industry rumput laut di Kab. Sinjai
- b. .Kegiatan Pengembangan dan pembinaan Sentra Kakao dialokasikan anggaran sebesar Rp. 34.750.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 34.250.000.,- atau sebesar 98.56 %. Capaian program ini adalah terbentuknya sentra industri kakao di Sulsel. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya 1 sentra industry kakao di Kab. Luwu utara.
- c. Kegiatan Pengembangan dan pembinaan sentra kopi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 59.225.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 58.404.700,- atau sebesar 98.61%. Capaian program ini adalah tumbuh dan kembangnya sentra IKM kopi. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya sentra industry kopi di Kab. Palopo
- d. Kegiatan Pengembangan dan pembinaan sentra industri hasil hutan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 60.600.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 60.547.400,- atau sebesar 99.91%. Capaian program ini adalah tumbuh dan kembangnya sentra IKM industri hasil hutan. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya sentra industry hasil hutan di Kab. takalar
- e. Kegiatan Pengembangan Sentra Pandai Besi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 55.650.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 55.649.998.,- atau sebesar 100%. Capaian program ini adalah tumbuh dan kembangnya sentra IKM pandai besi. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya sentra industry pandai besi di Kab. Sidenreng rappang

- f. Kegiatan Pengembangan Sentra industri kapal rakyat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 611.150.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 556.529.397.- atau sebesar 91.06 %. Capaian program ini adalah tumbuh dan kembangnya sentra industri kapal rakyat. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya sentra industry kapal rakyat di Kab. Sidenreng rappang
 - g. Kegiatan Pengembangan Sentra industri jagung dialokasikan anggaran sebesar Rp10.908.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 10.888.000.- atau sebesar 98.82 %. Capaian program ini adalah tumbuh dan kembangnya sentra industri jagung. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya sentra industry jagung di Kab. Sidenreng Maros
 - h. Kegiatan Pengembangan Sentra industri tekstil dan sutra dialokasikan anggaran sebesar Rp167.100.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 161.145.590.- atau sebesar 96.44 %. Capaian program ini adalah tumbuh dan kembangnya sentra tekstil dan sutra. Hasil dari program ini adalah: terbentuknya sentra industry teksti dan sutra
- 5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Program ini terdiri dari anggaran sebesar Rp. 2.176.930.950,- dan realisasi sebesar Rp. 2.136.120.843,- atau 98,13 %, dengan kegiatan sebagai berikut:**
- a. Kegiatan IKM EXPO dialokasikan anggaran sebesar Rp. 800.350.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 796.700.000.- atau sebesar 99,54 %. Capaian program ini adalah terpromosinya produk lkm Unggula kabupaten kota Sulawesi Selatan.
 - b. Kegiatan pembinaan dan Pengembangan Industri kima hilir dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.445.950,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 31.440.950,- atau sebesar 99,98 %. Capaian program ini adalah terlaksananya pelatihan SDM Sumber Daya industri kimia hilir. Hasil dari program ini adalah: terlatihnya SDM industri yang berbasis Sumber Daya Lokal Sulsel. Di kabupaten Jeneponto
 - c. Kegiatan pembinaandan pengembangan industri hasil hutan kayu dialokasikan anggaran sebesar Rp. 67.100.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 67,067,300,- atau sebesar 99.95 %. Capaian program ini adalah terlatihnya SDM industri hasil hutan kayu Sulsel pada kabupaten/kota yang optimal
 - d. Kegiatan pembinaandan pengembangan industri hasil hutan bukan kayu dialokasikan anggaran sebesar Rp. 177.560.000,- dan dapat direalisasi

- sebesar Rp. 146.794.100.,- atau sebesar 82.67. %. Capaian program ini adalah terlatihnya SDM industri hasil hutan bukan kayu Sulsel pada kabupaten/kota yng optim
- e. Kegiatan pameran produk IKM pada event daerah Nasional dan Inter nasional Sulsel dialokasikan anggaran sebesar Rp. 620.775.000.,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 620.772.203.,- atau sebesar 100 %. Capaian program ini adalah terpromosinya industri IKM unggulan kabupaten kota. Hasil dari program ini adalah: meningkatkan motivasi IKM dalam berinovasi
 - f. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 53.500.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 53.500.000,- atau sebesar 100 %. Capaian program ini adalah terbinannya industri kecil dan menengah dalam meningkatkan motivasi kemandirian IKM Sulawesi Selatan Hasil dari program ini adalah: meningkatkan kemandirian IKM dalam berinovasi
 - g. Kegiatan pelatihan penerapan GMP kimia Hilir dialokasikan anggaran sebesar Rp219.000.000.,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 218.461.150.,- atau sebesar 99,75 %. Capaian program ini adalah meningkatnya pengetahuan tentang pentingnya penerapan GMP kimia hilir pada industri IKM. Hasil dari program ini adalah: terlatihnya SDM industri Kimia hilir dalam mengetahui pentingnya GMP.
 - h. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan hilirisasi hasil pertanian dialokasikan anggaran sebesar Rp. 103.600.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 101.500.840.,- atau sebesar 97.99 %. Capaian program ini adalah meningkatnya kemampuan peserta latih hilirisasi pertanian. Hasil dari program ini adalah: peningkatan kemampuan SDM Industri hilirisasi hasil pertanian
 - i. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan hilirisasi hasil peternakan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 103.600.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 99.864.300.,- atau sebesar 96.39. %. Capaian program ini adalah meningkatnya kemampuan peserta latih hilirisasi peternakan. Hasil dari program ini adalah: peningkatan kemampuan SDM Industri hilirisasi hasil peternakan.

- 6. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Program ini terdiri dari anggaran sebesar Rp. 1.518.195.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.455.797.443,- atau 95,89 %, dengan kegiatan sebagai berikut :**
- a. Kegiatan Pembuatan Prototype Alat/Mesin Pertanian dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 124.500.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 124.357.500,- atau sebesar 99,89%. Capaian program ini adalah Jumlah produk industry yang memenuhi standar. Hasil dari program ini Terlaksananya kegiatan pembuatan prototype Alat/Mesin pertanian.
 - b. Kegiatan Sosialisasi/Demonstrasi Alat/Mesin Pertanian di Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 98.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.790.000,- atau sebesar 100%. Capaian Programnya ini adalah Jumlah produk industry yang memenuhi standar. Hasil dari program ini Terlaksananya Kegiatan sosialisasi/Demonstrasi Alat/Mesin pertanian di kabupaten/kota.
 - c. Kegiatan Sinergitas Industri Alat Transportasi Logam dan Mesin ke Pusat (kementerian Perindustrian) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 53.185.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.182.920,- atau sebesar 100%. Capaian Programnya ini adalah Jumlah produk industry yang memenuhi standar. Hasil dari program ini terlaksananya kegiatan Sinergitas Industri alat transportasi, logam dan mesin ke pusat.
 - d. Kegiatan Kegiatan Penatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Makanan, Minuman dan Kemasan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 137.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 135.974.000,- atau sebesar 99,25%. Capaian Programnya ini adalah Jumlah produk industry yang memenuhi standar. Hasil dari program ini adalah terlaksananya Pelayanan UPT Mamin dan Kemasan.
 - e. Kegiatan Pengembangan Industri Makanan, Minuman dan Kemasan bermitra dengan pelaku Usaha Industri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 53.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 52.510.287,- atau sebesar 99,08%. Capaian Programnya ini adalah Jumlah produk industry yang memenuhi standar. Hasil dari program ini adalah terlaksananya kemitraan pelaku Usaha Industri dengan UPT Mamin dan Kemasan.
 - f. Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Teknologi Makanan, minuman dan kemasan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 230.400.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 215.640.000,- atau sebesar 93,59%. Capaian Programnya ini adalah Jumlah produk industry yang memenuhi

standar. Hasil dari program ini adalah Meningkatnya kualitas Kemasan IKM.

- g. Kegiatan Pengembangan Industri kreatif berbasis Komunitas dialokasikan anggaran sebesar Rp. 54.920.000,- dan dapat terealisasi sebesar 50.945.780,- atau sebesar 92,76%. Capaian Programnya ini adalah Jumlah produk industry yang memenuhi standar. Hasil dari program ini adalah Meningkatnya Jumlah produk industri Start Up yang dibina dan diakses oleh masyarakat.
 - h. Kegiatan Pengembangan Technopark berbasis IT dialokasikan anggaran sebesar Rp. 245.100.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 240.818.311 atau sebesar 98,25%. Capaian Programnya ini adalah Jumlah produk industry yang memenuhi standar. Hasil dari program ini adalah Meningkatnya jumlah pengusaha baru bidang IT.
 - i. Kegiatan Pembinaan Standarisasi Produk Industri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 106.400.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 105.755.000,- atau sebesar 99,39%. Capaian Programnya ini adalah Jumlah produk industry yang memenuhi standar. Hasil dari program ini adalah Terstandarisasinya IKM.
 - j. Kegiatan Pengembangan SDM dan Produk Industri Fashion dan Garmen dialokasikan anggaran sebesar Rp. 97.900.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 89.848.304,- atau sebesar 91,78%. Capaian Programnya ini adalah Jumlah produk industry yang memenuhi standar. Hasil dari program ini adalah Meningkatnya pengetahuan SDM dan Kualitas Produk Industri Fashion dan Garmen.
 - k. Kegiatan Pengembangan SDM dan Industri Elektronika dan Telematika melalui Sistem Vokasional (Magang) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 317.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 287.975.341,- atau sebesar 90,84%. Capaian Programnya ini adalah Jumlah produk industry yang memenuhi standar. Hasil dari program ini adalah Meningkatnya Pengetahuan SDM dan Kualitas Produk Industri Elektronika dan Telematika melalui Sistem Vokasional (Magang).
- 7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Program ini terdiri dari anggaran sebesar Rp. 1.174.684.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.133.958.401,- . atau 96.53%, dengan kegiatan sebagai berikut:**
- a. Kegiatan pembinaan kemampuan tehnologi industri alat angkut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 63.290.000.,- dan dapat direalisasi

sebesar Rp 63.040.000,- atau sebesar 96.60 %. Capaian program ini adalah meningkatnya kemampuan peserta latih bidang teknologi industri alat angkut, hasil dari program ini adalah meningkatnya kemandirian pelaku IKM dalam pemanfaatan teknologi industri alat angkut

- b. Kegiatan klinik teknologi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 67.300.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 67.300,000 atau sebesar 100 %. Capaian program ini adalah meningkatnya kemampuan teknologi, pada pelayanan UPT. Hasil dari program ini adalah: termanfaatkannya konsulen UPT oleh pelaku usaha
- c. Kegiatan pembinaan kemampuan tehnologi industri elektronika dan informatikaa dialokasikan anggaran sebesar Rp.90.032.250,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 81.823,210,- atau sebesar 87.95 %. Capaian program ini adalah meningkatnya kemampuan teknologi industri elektronika dan informatika pelaku usaha. Hasil dari program terciptanya efektifitas produksi industri IKM
- d. Kegiatan pelatihan peningkatan mutu dan diverisifikasi produk kerajinan bagi IKM dialokasikan anggaran sebesar Rp.674.337.250.,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 664.063.432., - atau sebesar 98.48%. Capaian program terlatihnya pelaku IKM dalam meningkatkan mutu produk industri. Hasil yang di capai adalah meningkatnya pengetahuan pelaku IKM akan pentingnya verisifikasi mutu prodak
- e. Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran unit pelaksana teknis daerah (UPTD) logam .asintan, dan tekstil dialokasikan anggaran sebesar Rp. 153.725.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. Rp. 138.151.259,- atau sebesar 89.87%. Capaian program ini terciptanya publik cervice perkantoran logam, asintan dan tekstil, hasil yang di capai adalah meningkatnya pelayanan administrsi publik service pada UPTD logam, asintan dan tekstil.
- f. Kegiatan pelayanan dan pengembangan administrasi perkantoran unit pelaksana teknis daerah (UPTD) logam .asintan, dan tekstil dialokasikan anggaran sebesar Rp. 90.000.000.,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. Rp. 86.585.500,- atau sebesar 96.21%. Capaian program ini berkembangnya publik cervice perkantoran logam, asintan dan tekstil, dalam memeberikan pelayanan kepada pelaku usaha. Hasil yang di

capai adalah terwujudnya pelayanan publik service pada UPTD logam,asintan dan tekstil. Pada pelaku Industri

- g. Kegiatan pelayanan dan pengembangan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) tekstil dialokasikan anggaran sebesar Rp. 33.000,000. dan dapat direalisasi sebesar Rp. Rp. 32.995.000 atau sebesar 99.98 %. Capaian program ini terciptanya administrasi pelayanan tekstil pada pelaku usaha,hasil yang di capai adalah meningkatnya pelayanan administrsi publik service pada UPTD tekstil.

2. Permasalahan dan Strategi Pemecahannya

a. Permasalahan

1. Faktor internal :

- Masih terbatasnya SDM aparat yang berkualitas sebagai tenaga terampil (perencanaan, pembinaan dan pengawasan).
- Masih lemahnya koordinasi antara bidang dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Perindag Kab/kota se Sulawesi Selatan.
- Masih kurangnya sarana informasi yang bisa diakses secara langsung dalam rangka pemberian informasi kepada dan oleh pelaku serta dunia usaha, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM).

2. Faktor eksternal :

- Iklim usaha diwilayah Sulawesi Selatan belum kondusif
- Masih adanya biaya-biaya ekstra diluar dari biaya diluar dari biaya produksi yang menyebabkan biaya produksi tinggi.
- Lembaga keuangan masih ragu-ragu untuk memberikan paket kredit pada produk bahan baku.
- Adanya pengaruh produk-produk luar yang menjadi saingan produk lokal.
- Masih kurangnya jiwa Entrepreneurship pada para pelaku dunia usaha industri

b. Strategi Pemecahan Masalah

1. Faktor Internal

- Perlu adanya peningkatan SDM aparat, baik untuk pengetahuan teknis, wawasan maupun keterampilan yang dapat menunjang kelancaran tugas

- Adanya peningkatan koordinasi antara bidang-bidang maupun antar dinas perindag kab/kota.
- Tersedianya Informasi teknologi maupun promosi untuk memasarkan hasil industri di tingkat provinsi dan Kab/Kota.

2. Faktor Eksternal

- Menghilangkan biaya-biaya/pungutan yang membebani pengusaha industri
- Diharapkan lembaga keuangan dapat membuka paket kredit disektor industri baik dihilir maupun di hulu.
- Adanya kebijakan untuk pengwilayahan komoditi dari suatu daerah.
- Perlunya peralatan alat deteksi untuk mengetahui produk yang tidak sesuai SNI dan pemeriksaan bahan-bahan berbahaya untuk makanan dan minuman.

1. Keberhasilan yang telah dicapai (penghargaan yang diterima pada tahun 2019)

Beberapa keberhasilan yang diraih Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019, yaitu:

Pada Bidang ILMT :

- a) Terbentuknya satu sentra IKM logam pande besi di Desa lappo ase Kec,Awang Pone kab Bone dengan nama sentra **LOGAM ANDAI BESI PETTA PANRE BESSIE**
- b) Bimbingan teknis pembuatan Alat /mesin **Pawor Hammer (penempa besi)dan BELT Grinding (finising)**
- c) Terbentuknya satu sentra **IKM Kapal Rakyat Pada Kabupaten Bulukumba ,Kel Tanah Iemo,Kec,Bonto Bahari dngan nama sentra Cahaya Pinisi perkasa.**
- d) Kegiatan sosialisasi/Demonstrasi sbb
 - Mesin Raasting Kopi (penyangrai Kopi)
 - Mesin Mixer tembakau
- e) Tersedianya prototype alat/mesin industri unggulan sebanyak 3 (Tiga) unit, yaitu :

- Prototype alat/mesin lodisasi garam system kompresor sebanyak 1 (satu) unit .
 - Prototype alat/mesin slicer/pengiris umbi-umbian sebanyak 1 (satu) unit.
 - Prototype alat/mesin Disk Milk(penepung Kopi) sebanyak 1 (satu) unit.
- f) Kegiatan Sinergitas ILMT ke beberapa instansi di **Jakarta** sebanyak 3 kali
- Kementrian Perindustrian
 - Kementrian agraria dan Tata Ruang tentang revisi tata ruang
 - FGD Perkapalan
- g) Kegiatan Klinik Teknologi menyerahkan berupa alat/ mesin Pawor Hammer (penempa Besi) sebanyak 1 unit pada sentra IKM logam pandai besi La"bo KEC.Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara
- h) Pembinaan Kempuan teknologi Alat Angkut hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan dan keterampilan pelaku usaha IKM Bengkel Otomotif dengan kegiatan pengecatan /Duco mobil di kab WAJO

Pada Bidang IAKHH

a) Pengembangan sentra Industri Prioritas

- Pembinaan dan pengembangan sentra Industri rumput laut pada Kanbupaten Sijai
- Pembinaan dan pengembangan sentra Industri kakao pada Kanbupaten Luwu Utara
- Pembinaan dan pengembangan sentra Industri kopi pada Kanbupaten Palopo
- Pembinaan dan pengembangan sentra Industri hasil Hutan pada Kanbupaten Takalar.
- Pembinaan dan pengembangan sentra Industri Jagung pada Kanbupaten Maros.

Pembinaan dan pengembangan sentra-sentra prioritas tersebut diharapkan terkonsentrasinya pusat-pusat produksi hasil industri agro dalam rangka pengembangan produk dan usaha industri agro di Sulsel.

b) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- Pembinaan dan pengembangan Industri Kimia Hilir
- Pembinaan dan pengembangan Industri Hutan Kayu
- Pembinaan dan pengembangan Industri Hutan bukan Kayu
- Pelatihan penerapan GMP Kimia Hilir,
- Pembinaan dan pengembangan Hilirisasi Hasil pertanian

d) Pembinaan dan pengembangan Hilirisasi Hasil peternakan

Pada Bidang ITEA :

- a) Program pengembangan pengembangan sentra industri prioritas
- Kegiatan pengembangan dan pembinaan sentra Industri Tekstil dan Sutra yakni Kabupaten Wajo, Soppeng, Jeneponto, dan Bulukumba
 - Pengembangan dan pembinaan sentra Industri pertenunan di kab Wajo, Bulukumba, Jeneponto
 - Pengembangan dan pembinaan sentra industri pemintalan kabupaten Soppeng.
- b. Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri lain**
- Kegiatan peningkatan Mutu dan Diverifikasi produk kerajinan bagi IKM
 - Kegiatan pembinaan kemampuan Teknologi Industri Elektronika Informatika.
- c. Program peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi**
- Pengembangan SDM dan produk Industri Fasion dan Garmen
 - Pengembangan Technopark berbasis IT

Bidang IKM :

- a) Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Industri Provinsi(RPIP) Sulawesi Selatan Tahun 2019-2038. serta terlaksananya program kegiatan fasilitasi Halal dalam alokasi anggaran APBD sebanyak 3 IKM sedangkan anggaran APBN sebanyak 13 IKM.
- b) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kabupaten kota dan Meningkatkan informasi data IKM di 24 Kabupaten/Kota. Sulawesi Selatan
- c) Meningkatkan kreatifitas baik desain maupun mutu produk yang dihasilkan para pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebutuhan pasar. dalam Event IKM Ekspo
- d) Terpromosikanya produk unggulan Industri Kecil dan Menengah dari daerah/produk khas SulSel melalui Event Pameran Inacraft dengan tema mengembalikan kejayaan Sutra yakni Kabupaten Wajo, Bulukumba, Tanah Toraja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan pertanggung jawaban kepada Gubernur Sulawesi Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan LAKIP Tahun 2019 didasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) Penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan berdampak kepada semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi serta semakin luasnya peluang yang dapat dimanfaatkan.

Sebagai bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam menggunakan anggaran belanja tersebut di atas, dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019.

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2019 APBD di alokasi sebesar **Rp. 19.778.053.268,-** Belanja Langsung yang terdiri dari **7 program dan 55 kegiatan** sebesar **Rp. 10.637.028.350,-** dengan realisasi Rp. **10.382.522.647,-** (97.61. %). Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian Prov. Sulsel Tahun 2019 dengan target anggaran **Rp. 183.120.000.000,-** dengan **realisasi Rp. 145.826.500,- (79.63 %)**.

Disamping penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD dalam tahun anggaran 2019 Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan tugas dekonsentrasi atau dana APBN ada 1 (satu) sektor yaitu :

APBN sektor Perindustrian Dinas Perindustrian mendapatkan alokasi dana sebesar **Rp. 2,987,460.000,-** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 2.800.416.292.** atau sebesar **93.74 %** Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019.

Makassar, Januari 2020
Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan,

H. AHMADI AKIL, SE, MM
Pangkat: Pembina Tk.1
Nip .19651231 199403 1 081